

Menyoal Perasaan sebagai Dasar Tindakan Moral

Yeremias Jena

ABSTRAK: Apakah nalar dapat menggerakkan tindakan, termasuk tindakan moral? Tradisi etika klasik sejak Aristoteles mengafirmasi hal ini, bahwa nalar memang dapat menggerakkan tindakan moral. Pengetahuan akan yang baik dan buruk mendorong manusia untuk membiasakan diri melaksanakan apa yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Hal ini dilakukan karena manusia mau mencapai kebahagiaan, dan salah satu cara adalah dengan menjadi orang yang bermoral. Posisi moral semacam ini ditolak oleh David Hume. Bagi dia, tindakan moral manusia ditentukan semata-mata oleh perasaan (*passion*), bahwa tidak ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai selain seseorang bertindak mengikuti dorongan perasaannya dalam ruang dan waktu tertentu. Kajian komparatif dengan pemikiran-pemikiran etika semisal etika pengembangan diri atau etika kewajiban akan semakin mengingatkan kita bahwa tindakan moral tidak pernah bisa dilepaskan dari baik perasaan moral maupun pertimbangan nalar. Paper ini akan menegaskan sekali lagi posisi tradisi etika yang disebutkan terakhir tersebut.

KATA KUNCI: perasaan moral, nalar, kehendak, kebebasan, kausalitas, prinsip moral

ABSTRACT: Can human action be driven by reason, including moral action? Ethical tradition since Aristotle indicated that reason can indeed drive moral action. Knowledge of good or bad will encourage people to carry out what is good and avoid doing bad things. The reason why people do that is that because they want to be happy, and one way to achieve this is to be a moral person. However, this kind of moral position was rejected by David Hume. For him, moral action is determined solely by passion, never by reason. He argued that there is no highest goal to be achieved other than acting aroused by passion in a given time and space. By comparing the thoughts of David Hume to the ethics of self-realization or ethics of duty, we are reminded that moral action can never be separated from passion as well as moral reasoning. This position will be defended by this paper.

KEY WORDS: *Moral sense, reason, will, freedom, causality, moral principles, David Hume*

1. PENDAHULUAN

Salah satu penanda diskursus filsafat moral sebelum David Hume adalah penegasan tentang adanya hubungan yang niscaya antara akal budi dan tindakan moral. Filsuf moral besar seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Joseph Butler – untuk menyebut beberapa – tampaknya mewakili tradisi etika ini. Demikianlah, pada Aristoteles (384 SM–322 SM), misalnya, kita berhadapan dengan sebuah etika pengembangan diri yang bertumpu, antara lain, pada kemampuan untuk selalu bertindak menurut pengertian yang tepat. Jika tujuan tertinggi hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan, tujuan itu hanya bisa dicapai jika manusia memiliki kebiasaan bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat mengenai yang baik dan yang buruk. Meskipun pengetahuan (*episteme*) tentang yang baik dan buruk tidak secara otomatis membuat manusia menjadi baik secara etis, pertimbangan akan manakah yang baik dan buruk berdasarkan kemampuan *phronesis* (kebijaksanaan) manusia mengandaikan peran sentral nalar manusia.¹

Pada Thomas Aquinas (1225–1274), akal budi diharapkan bisa “mengalahkan” kehendak, tidak semata-mata karena kemampuan akal budi dalam menangkap mana yang benar dan yang salah, tetapi terutama karena keterbukaannya kepada realitas mutlak (Tuhan) yang menjadi alasan final bagi seluruh tindakan moral manusia. Manusia wajib melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Akal budi atau nalarlah yang membedakan manakah tindakan yang baik dan yang buruk. Apa yang baik berdasarkan panduan akal budi harus segera dikehendaki sebagai yang baik dan kemudian direalisasikan dalam tindakan. Demikian pula halnya dengan yang buruk, yang harus dikehendaki untuk tidak dilakukan.² Partisipasi nalar dalam Penyelenggaraan

Ilahi (*Divine Providence*) akan menyadarkan nalar bahwa tujuan tertinggi yang dikejar dan direalisasikan manusia dalam hidupnya bukanlah melihat atau memahami esensi Allah, tetapi mengalami kehadiran Allah di dunia akhirat.³

Demikian pula halnya dengan Joseph Butler (1692–1752) yang secara brilian mengatasi moralitas sebagai perasaan semata-mata dengan menekankan kemampuan reflektif manusia sebagai faktor yang sangat menentukan kualitas tindakan moral manusia. Moralitas memang tidak dapat dipisahkan dari perasaan, moralitas bukanlah dorongan spontan manusia. Perasaan tetap penting sebagai reaksi spontan manusia dalam menghadapi berbagai situasi moral. Perasaan dapat memicu kesadaran moral, tetapi perasaan harus tetap melewati penilaian nalar manusia. Moralitas pada akhirnya adalah kemampuan refleksi manusia akan yang baik dan buruk dan kemudian bertindak merealisasikan kebaikan.⁴

Titik balik penyangkalan atas peran pertimbangan nalar dalam pengambilan keputusan moral lahir di abad 18 bersamaan dengan semakin merajanya empirisme dalam filsafat pengetahuan. Adalah David Hume (1711–1776) yang mengatakan bahwa rasio atau nalar tidak dapat mengemudikan tindakan; bahwa yang dapat mengendalikan tindakan manusia semata-mata adalah perasaan.⁵ Sebagaimana dengan tepat dirumuskan oleh MacIntyre,

“Moral judgements cannot be judgements of reason because reason can never move us to action, while the whole point and purpose of the use of moral judgements is to guide our actions ... We are moved to act not by this or that being the case, but by the present of pleasure or pain of what is or will be the case. It is the passion and not the reason which are aroused by the prospect of pleasure and pain.”⁶

Di sinilah kita menemukan satu titik balik yang sangat tajam ketika David Hume menelanjangi moralitas dari pertimbangan akal dan kemudian mengenakan busana “emosi, nafsu, dan dorongan spontan lainnya” sebagai alasan bagi tindakan moral manusia

Tampaknya pemahaman moral yang menghebohkan pada zamannya ini masih memiliki pesona yang tidak akan pernah lekang di makan zaman⁷ di samping penolakan atau kritik tajam terhadapnya.⁸ Mendiskusikan ulang pemikiran David Hume mengenai tindakan moral sebagai yang digerakkan oleh perasaan demi merealisasikan kenikmatan (*pleasure*) atau demi menghindarkan diri dari rasa sakit (*pain*) dapat mempertajam pemahaman kita dalam mengidentifikasi sejauh mana perasaan diberi tempat dalam penalaran moral. Untuk maksud ini, tulisan ini akan mendeskripsikan berturut-turut (1) skeptisisme sebagai titik tolak pemikiran David Hume; (2) perasaan (*passion*) sebagai penggerak bagi tindakan moral; dan (3) pentingnya tanggungjawab dalam tindakan moral.

2. PEMBAHASAN

1. Skeptisisme Sebagai Titik Tolak

Dalam sejarah pemikiran Barat, Hobbes, Locke, Berkeley, dan Hume dikelompokkan sebagai para perintis empirisme modern. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang sah harus bersumber pada pengalaman empiris dan bukan pada subjek yang berpikir secara independen dari pengalaman dan kemudian memutuskan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada.

David Hume dilahirkan tanggal 26 April 1711 di dekat kota Edinburg, Skotlandia. Ayahnya, Joseph Hume meninggal dunia pada saat David Hume baru berusia dua tahun. Sang ibu, Katherine Falconer Hume, kemudian berperan

membesarkan David Hume bersama seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Sebagai anak dari suatu keluarga bangsawan, David Hume tidak pernah mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Semasa mahasiswa di Edinburg ia meminati studi klasik dan secara mandiri mempelajari filsafat, bidang yang tidak dikehendaki ibunya tetapi yang justru ditekuninya seumur hidup.

David Hume memiliki minat yang sangat luas dalam dunia akademik. Ia tidak hanya mempelajari literatur klasik dan filsafat, tetapi juga politik internasional. Ia sempat menjabat sebagai sekretaris Kedubes Inggris di Prancis, kesempatan yang memungkinkan dia membina relasi dengan para filsuf pencerahan Prancis ternama seperti D'Alembert, Diderot, dan Rousseau.⁹

David Hume lah filsuf yang pertama kali menabuh genderang perang melawan filsafat, bukan dengan maksud untuk menghancurkannya, tetapi membersihkannya dari simbol-simbol religius dan metafisika. Proyek pemikiran yang dicanangkannya adalah keinginan untuk melengkapi filsafat dengan sebuah metode ilmiah yang ketat. Realisasi proyek ini dilakukannya dengan mengambil sikap skeptis. Hume prihatin, bahwa metafisika tradisional sangat kabur, tidak pasti, melebih-lebihkan akal manusia, bercampur-baur dengan dogma-dogma Katolik, jargon-jargon politis, dan tahayul-tahayul rakyat.¹⁰

Dalam rangka menciptakan sebuah metode ilmiah yang ketat bagi filsafat inilah Hume mengajukan sikap skeptisnya terhadap tiga kubu pemikiran yang berkembang pada waktu itu. *Pertama*, Hume melawan ajaran-ajaran rasionalisme tentang idea-idea bawaan serta anggapan mereka bahwa jagat terdiri dari sebuah keseluruhan yang saling bertautan. Di sini ia setuju dengan Locke, bahwa hanya realitas empiris yang dapat diandalkan sebagai sumber pengetahuan. Meskipun

demikian, Hume menarik garis yang tegas antara pandangan-pandangannya sendiri dengan pandangan-pandangan Locke. Jika Locke masih percaya pada *sensasi* (pencerapan lahir) dan *reflexion* (pengalaman batin yang tidak berdasarkan refleksi teoretis atau akal budi), Hume menolak sama sekali objek. Bagi Hume, “yang bisa diketahui pikiran hanyalah persepsi, dan bukan objek. Kita tidak pernah tahu kaitan antara persepsi dan objek-objek di luar diri kita. Bukti untuk hal itu juga tidak ditemukan secara empiris.”¹¹ Demikianlah, menurut Hume, segala isi kesadaran berasal dari pengalaman indrawi

Demikianlah, setiap kali berhadapan dengan suatu peristiwa, kita memiliki kecenderungan alamiah untuk percaya bahwa kita sedang melihat suatu objek secara langsung sebagaimana objek tersebut menampilkan diri. Padahal yang sebenarnya kita lihat hanyalah gambaran batin (*mental images*) dari suatu objek eksternal yang menampilkan diri. Dengan begitu, yang dapat diketahui pikiran bukanlah hasil dari asosiasi berbagai kesan (*images*) mengenai pengalaman kita, yang sekali lagi tidak pernah bisa menjelaskan objek pada dirinya. Pengertian (*ideas*) tidak lebih dari sebuah proses psikis subjek dalam menghubungkan dan mengkombinasikan berbagai data empiris yang tampil dalam kesadarannya. Sama seperti objek, pengertian mengenainya pun tidak memiliki eksistensi pada dirinya.¹²

Kedua, Hume ingin menyerang pemikiran-pemikiran religius, terutama ajaran agama Katolik, Anglikan, serta aliran deisme. Menurut Hume, agama ternyata masih percaya pada adanya sebab tertinggi, karena menerima kausalitas sebagai hukum penyebabkan dalam memahami alam semesta. Hume sendiri berpendapat bahwa prinsip kausalitas tidak dapat diandalkan sebagai prinsip penjelas perubahan realitas. Setiap kali berhadapan dengan realitas yang

bergerak atau berubah, kita hanya menangkap kesan bahwa peristiwa yang satu diikuti oleh peristiwa lainnya. Pengamatan kita terhadap suatu peristiwa mengesankan bahwa seakan-akan ada hubungan yang tetap antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Menurut Hume, kesan ini hanyalah kebingungan kita belaka. Dalam kasus api menyala, misalnya, kita melihat bahwa api sedang menyala, menyentuh kertas, dan kemudian kertas terbakar. Di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa api menyebabkan kertas terbakar. Yang bisa kita ketahui adalah kertas terbakar *sesudah* api menyentuhnya. Dalam setiap peristiwa hanya terdapat urutan waktu dan tidak pernah sebuah hubungan internal.¹³

Ketiga, Hume menyerang empirisme itu sendiri yang masih percaya pada substansi. Descartes memahami substansi sebagai sesuatu yang berada pada dirinya sendiri, sesuatu yang adanya sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan ada yang lain untuk berada¹⁴. Hume menolak adanya dunia independen di belakang apa yang kita amati dalam realitas. Jika Descartes masih membedakan antara atribut yang bisa kita tangkap (misalnya warna, gerak-gerik, bentuk, dan sebagainya) dan realitas pada dirinya sendiri yang keberadaannya justru menopang atribut-atribut ini (*sine re substantie*), Hume justru menolak sama sekali substansi tersebut. Menurut Hume, yang kita lihat pada sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Kita hanya melihat pelbagai segi yang melekat pada sesuatu, semacam *bundle of perceptions*.

2. Etika Sebagai Perasaan Moral?

Pandangan etika David Hume dibangun di atas pemikiran skeptisnya mengenai pengetahuan. Sebuah contoh dapat dikemukakan di sini untuk mengilustrasikan pemikiran David Hume mengenai skeptisisme dan konse-

kuensinya bagi tindakan moral. Foto Alan Kurdi, bocah 3 tahun asal Syria yang mati tenggelam di Laut Mediterania dalam penyeberangan dari Turki ke Pulau Kos di Yunani pada tanggal 2 September 2015 telah menggugah sekaligus mengubah sikap banyak negara Eropa terhadap membanjirnya imigran ke benua biru belakangan ini. Foto bocah tak berdosa yang tertelungkup tak bernyawa di pinggir Pantai Kobani (Turki) mengundang empati jutaan masyarakat di dunia, tidak terkecuali para pemimpin negara Eropa. Dampak dari kejadian ini adalah diizinkan ribuan pengungsi masuk dan tinggal di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Swiss, Inggris, Italia, dan sebagainya. Tampaknya melunaknya sikap politik negara-negara ini sedikit banyak dipengaruhi oleh foto dramatis bocah malang tersebut.¹⁵

Dengan mengaplikasikan pandangan skeptis David Hume, harus disimpulkan di sini bahwa karena bukan merupakan objek pada dirinya, rangkaian foto Alan Kurdi tidak mengatakan hal apapun mengenai siapa atau apa yang sedang dialami oleh bocah 3 tahun itu. Kita membangun pengertian (*ideas*) dan kesimpulan tentang Alan Kurdi sebagai “meninggal dunia” atau yang merepresentasikan potret buram kekerasan politik berdasarkan persepsi dan asosiasi dari berbagai kesan dalam diri kita. Bahwa kemudian masyarakat menaruh empati dan mengubah sikap dalam memperlakukan kaum imigran, itupun tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari melihat rangkaian foto Alan Kurdi atau membaca berita dan ulasan seputar peristiwa tersebut. Masalahnya, mengapa foto dan berita-berita tersebut mampu menggerakkan kesadaran moral dalam bertindak moral memperlakukan kaum imigran secara lebih manusiawi? Apakah tindakan-tindakan moral tersebut juga harus disangkal sebagai sekadar impresi yang tidak berkesudahan?

YEREMIAS JENA – MENYOAL PERASAAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN MORAL

Problem yang dihadapi David Hume sebenarnya lebih dari sekadar menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dia berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindakan moral, tetapi tidak bisa dipahami sebagai hasil kausalitas dari kesadaran moral terhadap pengalaman konkret tertentu, misalnya ketika berhadapan dengan situasi tragis tertentu. Bagi dia, tindakan moral – misalnya mengizinkan kaum imigran masuk dan menetap di negara-negara tertentu di Eropa – semata-mata didorong oleh apa yang disebutnya sebagai perasaan (*passion*). Baik dan buruknya suatu tindakan semata-mata ditentukan oleh perasaan, yakni pada efek-efek tindakan tersebut bagi perasaan kita. Efek tersebut sifatnya segera atau tiba-tiba (*immediate*). Bahwa orang harus bertindak etis ketika efek yang ditimbulkan di masa depan adalah baik dan menyenangkan seraya terus menghindari melakukan tindakan-tindakan yang efeknya buruk atau yang mendatangkan penderitaan.¹⁶

Pertanyaannya, apakah semua tindakan membangkitkan perasaan moral tertentu? Atau hanya tindakan tertentu saja? Jika tindakan tertentu saja, lalu tindakan macam apakah itu? Bagi Hume, pada umumnya kita menyetujui semua aksi yang memiliki hubungan dengan kemanusiaan yang luas. Jadi, terhadap peristiwa naas yang menimpa Alan Kurdi dan keluarganya, misalnya, perasaan moral kita memang dibangkitkan. Perasaan moral ini muncul pertama-tama karena kita berhadapan dengan sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa yang kita amati dan yang membangkitkan perasaan moral kita adalah seorang bocah 3 tahun tidur tertelungkup di pinggir pantai dalam keadaan tak bernyawa, seorang petugas pantai sedang menggendong bocah tersebut, reaksi histeris anggota keluarga saat penguburan, reaksi simpatik para pemimpin dan masyarakat dunia, serta diizinkan ribuan imigran masuk dan

menetap sementara di beberapa negara Eropa. Meskipun demikian, menurut David Hume, kejadian-kejadian ini terpisah satu sama lain, jadi *tidak memiliki hubungan sebab-akibat*.¹⁷

Lebih lanjut David Hume mengatakan bahwa kita tidak bisa mengerti lebih dari kejadian-kejadian itu. Terhadap peristiwa ini janganlah kita menggunakan nalar untuk menyelidiki sebab-sebabnya dan kemudian memutuskan siapakah yang bertanggung jawab. Kalau kemudian negara-negara Eropa bersikap lunak terhadap imigran dan mulai menerima mereka sebagai pencari suaka, tindakan tersebut tetaplah sebuah fakta empiris lain yang berbeda dan yang mampu membangkitkan perasaan moral. Meskipun demikian, kejadian ini tidak memiliki hubungan kausalitas dengan tewasnya Alan Kurdi dan keluarganya.

Kalau kita kemudian memutuskan untuk menolong para korban tragedi itu, putusan semacam ini tidak didasarkan pada refleksi akal budi kita, tetapi pada perasaan (*passion*) kita. “Rasio tidak dapat menggerakkan apa-apa. Rasio tidak dapat mengemudikan tindakan; ia tidak dapat menggerakkan apa-apa. Yang dapat menggerakkan tindakan semata-mata perasaan.”¹⁸ Kita merasa memiliki semacam kewajiban untuk bertindak demikian karena pertama-tama tindakan kita akan sangat berguna bagi masyarakat. Selain itu, kita juga bisa menyenangkan hati orang lain (meringankan penderitaan mereka) dan dengan demikian menerima kebaikan hati mereka. Kalau muncul perasaan bahwa tindakan kita ini tidak akan menguntungkan—memberi kenikmatan atau manfaat—individu dapat memutuskan untuk tidak melakukannya. Secara alamiah, kita memang memiliki bakat simpati serta dorongan untuk bersikap baik, bertindak tanpa pamrih, dan menyenangkan orang lain. Jadi,

sebenarnya wajar jika kita menolong orang lain yang sedang menderita. Tindakan yang dilakukan dengan mengikuti dorongan kodratih tersebut tidaklah salah.¹⁹ Meskipun demikian, tragedi kemanusiaan tertentu tetap tidak bisa membangkitkan kewajiban moral tertentu, entah sikap empati terhadap korban (seperti kasus Alan Kurdi) maupun sikap politik memerangi tentara ISIS yang telah menyebabkan terusnya jutaan manusia dari Syria dan negara-negara sekitarnya.

Salah satu hal yang sulit diperdamaikan dengan pemikiran David Hume mengenai perasaan sebagai dasar bagi tindakan moral adalah persoalan kebebasan pelaku moral. Pertanyaannya, jika tindakan moral manusia didasarkan pada perasaan moral, apakah manusia memiliki kebebasan? Kebebasan pada Hume tidak dipahami dalam pengertian kebebasan sebagai kemampuan kehendak untuk menentukan dirinya sendiri. David Hume tidak mengakui kehendak (*will*) sebagai dasar bagi kebebasan dalam bertindak. Bagi Hume, kebebasan tidak lebih dari tiadanya keniscayaan. Orang hanya dikatakan bebas jika tindakannya ditentukan oleh keinginan-keinginannya sendiri dan tidak terkendali oleh faktor-faktor dari luar.²⁰

3. Tindakan Moral Selalu Disertai Tanggungjawab

Sampai di sini, kita sebetulnya menghadapi problem serius dalam memahami tindakan-tindakan moral kita. David Hume menegaskan seluruh tindakan moral sebagai pilihan tindakan yang rasional dan bermakna. Dengan begitu, dia juga menyangkal tindakan moral sebagai ekspresi dari watak bermoral setiap pelaku moral. Dan jika perasaan (*passion*) menjadi satu-satunya dasar bagi tindakan moral, kita tidak hanya menelanjangi dimensi rasionalitas dari

setiap tindakan, tetapi juga kebingungan dalam menentukan tujuan tertinggi tindakan moral kita. Dalam perspektif etika Aristotelian, tindakan moral yang merupakan realisasi dari pribadi bermoral adalah bentukan watak dalam proses panjang pengembangan diri. Komparasinya dengan etika pengembangan diri Aristoteles dan etika tanggungjawab Immanuel Kant dapat semakin mempertajam kesadaran kita akan sulitnya mempertahankan pandangan David Hume mengenai perasaan sebagai satu-satunya landasan bagi tindakan moral.

3.1 Aristoteles: Keniscayaan Tindakan Moral yang Dikehendaki

Dengan mengatakan bahwa tindakan moral didasarkan pada perasaan dan bukan pada pertimbangan rasional, David Hume sebenarnya sedang memperlakukan tindakan moral sebagai sebuah fakta pengetahuan yang tidak boleh dikonstitusi oleh berbagai otoritas eksternal. Dalam pemahaman Hume, pertimbangan rasional pasti mengacu kepada otoritas eksternal, entah itu bernama “kehendak” atau pertimbangan-pertimbangan teologis sebagaimana kritiknya terhadap pemikiran para filsuf skolastik, katakan saja Thomas Aquinas sebagai contoh.²¹

Tampaknya peran nalar dalam pertimbangan moral terlalu direndahkan oleh David Hume. Dalam pemikiran etika Aristoteles, harus dikatakan bahwa *pertama*, pertimbangan rasional menunjukkan sikap hati-hati (*prudence*) dalam pengambilan tindakan moral. Sikap hati-hati itu penting untuk menegaskan kedalaman perhatian dan sikap sikap moral. Walaupun ada perasaan moral yang sama terhadap dua subjek moral yang menjadi korban tindak kejahatan, sikap terhadap keduanya tidak pernah bisa sama. Ada faktor-faktor tertentu yang pertimbangan atasnya membuat seseorang mengekspresikan sikap simpati

secara berbeda terhadap keduanya. Dengan begitu, objektivitas tindakan moral yang dibayangkan Hume sebagai fakta pengetahuan yang seharusnya disikapi secara sama oleh setiap pelaku moral karena adanya kesamaan perasaan terhadap fakta tersebut harus dibaca sebagai semacam “wishful thinking”.

Kedua, dalam pemikiran Aristoteles, pertimbangan nalar yang bijaksana (*phronesis*) yang bermuara pada keputusan bertindak secara moral tertentu justru menegaskan bahwa seorang pelaku moral tidak hanya menghendaki tindakan tersebut sebagai tindakannya, tetapi juga keyakinannya akan kemampuannya sendiri dalam merealisasikan apa yang telah dikehendakinya.²² Hanya dengan begitu, manusia menegaskan bahwa dialah sumber tindakannya, bahwa dia telah mempertimbangkan segala aspek dengan baik dan memutuskan apa yang memang mampu dilakukannya. Mendasarkan tindakan moral pada perasaan sebagaimana dipromosikan David Hume hanya akan mendegradasikan manusia pada level binatang yang tindakannya semata-mata digerakkan oleh mekanisme psikis pengakumulasian kenikmatan (*pleasure*) dan penghindaran ketidaknikmatan (*pain*).

Ketiga, David Hume berpendapat bahwa rasio tidak dapat menggerakkan apa-apa. Yang bisa menggerakkan tingka laku manusia adalah perasaan. Penolakan terhadap dimensi rasionalitas ini tidak pada tempatnya jika dipahami dalam konteks pemahaman Aristoteles. Mengenai hubungan antara akal budi dan etika, Aristoteles berpendapat bahwa etika tidak didasarkan pada *episteme* (pengetahuan) tetapi pada *phronesis* (kebijaksanaan). Kebijakan ini sama sekali tidak memusuhi akal budi, karena diharapkan bahwa orang yang terus-menerus bertindak secara rasional akan mencapai kebijakan. Dengan kebijakan, tindakan moral tidak lagi semata-mata didasarkan pada

pertimbangan akal budi, tetapi pada bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam bidang masalah yang baik dan buruk.

3.2 Immanuel Kant: Nalar Mengkonstruksi Prinsip Moral

Immanuel Kant mengakui bahwa pengaruh pemikiran skeptis Hume telah membangunkannya dari tidur dogmatismenya. Kritik Hume terhadap rasionalisme yang sangat mengagungkan rasio sebagai penentu pengetahuan dan keberpihakannya pada empirisme justru mendorong Kant untuk mensintesis pengetahuan rasionalis dan empiris. Berbeda dengan Hume yang menolak sama sekali pengetahuan metafisis, Kant dalam bukunya *Critique of Pure Reason* justru bertanya tentang kesahihan pengetahuan metafisis (*a priori*) dan bagaimana pengetahuan tersebut mungkin.

Dengan putusan/pengetahuan *a priori* Kant justru menekankan pentingnya subjek pengetahuan dalam memahami objek. Jika Hume dengan berat sebelah menekankan pengetahuan empiris, maka Kant menekankan pentingnya nalar. Tetapi tidak seperti kaum rasionalis, Kant justru menekankan bahwa dalam mengetahui objek yang menampilkan diri kepada pikiran memang ditangkap secara intuitif. Meskipun objek tersebut mengandung unsur materi (jadi sifatnya *a posteriori*), tetapi oleh akal budi dipahami dalam form-forma (bentuk-bentuk), yakni bentuk ruang dan waktu. Peran nalar dalam pengetahuan tidak bisa menolak secara total prinsip sebab-akibat.

Absennya peran rasio pada Hume dan terdegradasinya moralitas pada level perasaan semata-mata memang memustahilkan diterimanya prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip moral ini tidak bisa ditiadakan, karena manusia senantiasa hidup dalam interaksi dengan prinsip-prinsip moral, misalnya orang

harus berlaku jujur dan adil. Hume secara sangat simplistik menolak hal ini, sementara Kant merefleksikannya secara mendalam. Kant justeru bertanya, bagaimana prinsip-prinsip moral ini bisa dihasilkan. Pada Kant, prinsip-prinsip moral ini dihasilkan oleh rasio praktis.

Rasio praktis menghasilkan asas-asas moral. Asas-asas moral ini membangkitkan kesadaran *a priori* dalam nalar manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu. Kehendak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini disebut sebagai maksim (kehendak subjek/*volition*). Dengan mengatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan asas-asas moral yang telah dipilih sebagai maksim sebagai sebuah kewajiban yang bebas dari pengaruh apapun juga, Kant justeru dengan tajam mengeritik model-model pendasaran etika lainnya, termasuk etika perasaan yang dikemukakan David Hume.

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh David Hume, bahwa nalar tidak menggerakkan sikap moral tertentu melainkan perasaan, Kant justeru sangat menekankan dimensi rasionalitas ini. Bagi Kant, tindakan manusia tidak ditentukan oleh relativisme maupun skeptisisme. Tindakan manusia pertamanya merupakan tindakan yang bebas yang menempatkan si pelaku tindakan sebagai pribadi yang otonom. Selain itu, tindakan manusia harus dapat dituntut pertanggungjawabannya secara rasional oleh orang lain.

Tampak jelas bahwa David Hume terperangkap dalam dunia inderawi, dunia yang tidak memiliki hubungan kausal sehingga tidak bisa juga membangkitkan moralitas, dunia yang tidak bisa diatasi oleh nalar karena nalar memang tidak diberi tempat. Sementara dengan menempatkan akal budi (*vernunft*) sebagai yang bisa mengatasi medan panca indera, Kant mampu menempatkan tidak hanya pengetahuan yang benar mengenai kenyataan, tetapi

juga dasar-dasar moralitas manusia. Bagi Kant, moralitas bisa dipahami melalui akal budi praktis. Akal budi praktislah yang memungkinkan manusia dalam memilih tindakan tanpa segala penentuan inderawi, misalnya dorongan batin, kebutuhan, nafsu, emosi, perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan sebagainya.

Akal budi praktis sebagai dasar moralitas yang telah membebaskan diri dari faktor-faktor eksternal justeru menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dalam merancang tindakan-tindakan moralnya, termasuk keputusan untuk tidak mematuhi perasaan senang tidak senangnya. Dimensi kebebasan ini sama sekali ditolak dalam etika Hume. Pada Hume manusia seakan-akan ditentukan (dideterminasi) oleh perasaan-perasaannya dan bertindak menurut perasaan moral tersebut. Penolakan terhadap dimensi kebebasan tindakan manusia akan berimplikasi pada kesulitan dalam menerima sesuatu tindakan sebagai kewajiban. Hume mengangkat hanya salah satu dimensi manusia, bahwa manusia bisa bertindak sesuai dengan dorongan-dorongan nafsu, emosi, dan perasaannya, tetapi karena ia menutup dimensi rasionalitas manusia, maka tindakan moral sebagai kewajiban tidak bisa diberi tempat. Kantlah yang dengan gemilang mengatakan bahwa justeru manusia bisa bertindak tidak semata-mata sesuai dengan akal budinya, tetapi juga perasaan-perasaannya, sehingga tindakan manusia tidak bisa tidak merupakan kewajiban. Tindakan moral sebagai kewajiban tidak hanya menggarisbawahi dimensi kebebasan ini dan tindakan rasional, tetapi juga dimensi otonomi moral manusia.

Mempertahankan pandangan Hume yang tidak memberi ruang pada kewajiban merupakan sesuatu yang mengerikan. Masalah-masalah moral seperti aborsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kloning, ketidakadilan sosial,

dan sebagainya tidak bisa ditampung oleh teori moralitas Hume. Sementara dengan paham etika kewajiban Kant, hal-hal tersebut bisa diberi tempat.

3. PENUTUP

Kritik tajam David Hume terhadap empirisme sebagai yang memahami realitas konkret dengan mendasarkan diri pada substansi tertentu justru dianggap sebagai asing dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan kontemporer. Para ilmuwan menerima sebagai kenyataan bahwa fakta ilmu pengetahuan tidak bisa dipahami tanpa rujukan kepada konsep atau teori tertentu. Tradisi komunitas keilmuan dalam melakukan penelitian maupun program riset ikut berperan dalam memahami realitas.²³ Dalam arti itu, mustahil membebaskan peran nalar maupun hubungan kausalitas dalam memahami berbagai objek pengetahuan.

Mereduksikan fenomena moral sebagai semata-mata fakta pengetahuan yang pemahaman atasnya dilakukan dengan mengandalkan hanya perasaan (*passion*) justru bertentangan dengan pengalaman konkret manusia. Immanuel Kant membantu kita dengan pemikiran bahwa tindakan etis harus berangkat dari kehendak baik (*gutter Wille*) dan bukan ditentukan oleh otoritas eksternal tertentu.²⁴ Memang penekanan berlebihan pada peran subjek moral dalam menghendaki prinsip tindakannya sebagai yang berlaku universal telah ikut mengorbankan dimensi perasaan (*passion*) dalam pertimbangan moral, tetapi paling tidak apa yang dikatakan Kant menegaskan kembali dimensi yang tak dapat disangkal dari setiap keputusan moral manusia: peran prinsip moral yang keberlakuannya bersifat universal dan imparsial.

Immanuel Kant mengembalikan pertimbangan dan keputusan moral sebagai kerja nalar dan itu sejalan dengan tradisi etika yang telah berumur ribuan tahun sejak Aristoteles. Bahwa individu menghendaki tindakannya secara sukarela dan menginginkannya sebagai tindakan demi suatu kebaikan tertentu. Suatu kehendak untuk melakukan tindakan tertentu dapat saja muncul karena situasi atau pengalaman moral tertentu ketika perasaan moral memainkan peran yang tidak dapat dianggap remeh.²⁵ Simpati, empati ataupun sikap kepedulian sebagaimana diagung-agungkan banyak etikawan kontemporer mustahil dapat dimengerti hanya dengan perasaan (kritik terhadap David Hume) atau bahkan menghapusnya sama sekali dari pertimbangan moral (kritik terhadap Immanuel Kant).

Nalar bukan tidak bisa menggerakkan tindakan, tetapi hanya akan membuat pelaku moral mementingkan hanya prinsip-prinsip moral yang kaku dan formalistis. Sementara mengandalkan hanya perasaan moral justru akan mereduksikan tindakan manusia pada tahap binatang. Nalar dan perasaan moral adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam setiap pertimbangan dan keputusan moral.

CATATAN AKHIR

¹ Magnis-Suseno (2001, 36-39). Sebagaimana dijelaskan MacIntyre, nalar berperan dalam membuat diskresi antara manakah “yang baik” yang dikejar demi tujuan pada dirinya dan amanakah yang tidak dan yang kemudian membiasakan diri secara terus-menerus untuk selalu melakukan “yang baik” sebagai “kebaikan tertinggi” yang memang pantas dikejar dan direalisasikan. Macintyre (1998, 38-39).

² Magnis-Suseno(2001, 86).

³ Russel(1972, 458-459).

YEREMIAS JENA – MENYOAL PERASAAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN MORAL

⁴ Magnis-Suseno(2001, 112-113).Butler sebetulnya berpendapat bahwa perasaan (*passion*) adalah bagian dari cinta-diri (*self-love*) dalam sebuah tindakan moral. Tindakan moral yang digerakkan oleh perasaan individu selalu merupakan tindakan moral demi merealisasikan cinta-diri. Hanya saja, mengutamakan cinta-diri sama saja dengan mencapai hanya kepuasan (*pleasure*) subjektif yang pada gilirannya akan berkonflik dengan cinta-diri dan kepuasan orang lain. Moralitas yang baik memang harus memiliki dimensi kepuasan dan cinta-diri, tetapi juga menuntut adanya upaya memajukan kebaikan (*benevolence*) orang lain. Peran distingtif nalar sebenarnya mengafirmasi kemampuan subjek moral dalam melampaui kepentingan subjektif cinta-diri dan mengarahkan tindakan moral demi merealisasikan kebaikan orang lain. Irwin (2008, 504-505).

⁵ Magnis-Suseno(2001, 127).

⁶ Macintyre(1998, 108).

⁷ Meskipun diakui bahwa teori keadilan dalam pemikiran Hume adalah terbatas, Elizabeth H. Wolgast berpendapat bahwa gagasan Hume mengenai perasaan (*passion*) justru memberikan kedalaman pemahaman kita mengenai keadilan. Menurut Wolgast, tanpa gagasan ini mustahillah kita bisa memahami secara mendalam ungkapan-ungkapan moral seperti “that’s a frightful thing to do”, “what an unjust law!”, “he’s a vicious man”, “that’s terrible!”, “it was a frightful thing to do!” dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan moral semacam ini tidak memiliki kedalaman apa-apa dalam keadaan *natural justice*. Menarik bahwa, menurut Hume, gagasan mengenai keadilan muncul berhadapan dengan munculnya masalah sosial yang dewasa ini antara lain bisa kita bahasakan sebagai “situasi ketidakadilan sosial”. Dengan mengidentikan gagasannya mengenai keadilan dengan perasaan keadilan Hume, Wolgast menegaskan bahwa pemikiran, empati, ataupun perjuangan keadilan dewasa ini tidak memiliki makna yang mendalam tanpa adanya perasaan moral sebagaimana dikemukakan Hume.” Wolgast (1987, 141-144).

⁸ MacIntyre (1998, 108-113).

⁹ Morrisdan Brown (2015).

¹⁰ Budi Hardiman (2007, 85-93).

¹¹ Budi Hardiman (2007, 85-93); Van Peursen (1991, 22-23).

¹² Magnis-Suseno(2001, 124).

¹³ Menurut David West, Hume mengeritik pandangan dunia abad pertengahan atas alam sebagai sistem teologis dan entitas-entitas yang digerakan oleh kepercayaan dari dalam batin untuk mencapai tujuan esensialnya. Bagi Hume, walaupun ada tujuan-tujuan esensial tersebut, kita tetap tidak bisa mengetahuinya. Lihat West(1972, 667).

¹⁴ Van Peursen(1991, 74).

¹⁵ Kurdi2015; Omer Aziz2015.

¹⁶ Russel(1972, 672).

¹⁷ Tentang hal ini, David Hume menulis, “... all our reasonings concerning causes and effects are derived from nothing but customs, and that belief is more properly an act of the sensitive, than of the cognitive part of our natures.” Dikutip dari Russel(1972, 671).

¹⁸ Magnis-Suseno(2001, 127).

¹⁹ Karena pandangannya yang sangat ekstrem semacam ini, David Hume kemudian disebut sebagai seorang hedonis yang tidak egois. Disebut sebagai hedonis karena memprioritaskan tindakan moral yang mendatangkan efek menyenangkan (*pleasure*) bagi dirinya tetapi juga tidak egois karena efek tersebut juga mendatangkan kenikmatan bagi *moral patient* lainnya. Lihat MacIntyre(1998, 111-112).

²⁰ Magnis-Suseno(2001, 129).

²¹ Irwin (2008, 55-56).

²² Aristoteles(2004, 57-59).

²³ Jena (2015, 57-68).

²⁴ Budi Hardiman (2004, 147-149).

²⁵ Irwin (2008, 579-580).

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, 2004. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Embun Kenyowati, Jakarta: Penerbit Teraju.

Azis,Omer, 2015. “Now Is the Time for Blame: Alan Kurdi and the Myth of a ‘Generous’ Canada” di http://www.huffingtonpost.com/omer-aziz/now-is-the-time-for-blame_b_8093904.html, akses 9 September 2015.

YEREMIAS JENA – MENYOAL PERASAAN SEBAGAI DASAR
TINDAKAN MORAL

- Budi Hardiman, F., (2004) 2007. Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Irwin, Terence, 2008. The Development of Ethics. A Historical and Critical Study. Volume II: From Suarez to Rousseau, London: Oxford University Press.
- Jena, Yermias, 2015. Filsafat Ilmu. Kajian Filosofis atas Sejarah dan Metodologi Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kurdi, Alan, 2015. Wikipedia, the free encyclopedia. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Kurdi, akses 9 September 2015.
- MacIntyre, Alasdair, (1967) 1998. A Short History of Ethics. London: Routledge.
- Magnis-Suseno, Franz. (1997) 2001. 13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Morris, William Edward dan Brown, Charlotte R., "David Hume", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/hume/>>. Accessed 9 September 2015.
- Russell, Bertrand, 1972. A History of Western Philosophy, New York: Simon & Schuster, Inc.
- Van Peursen, C.A., [1988] 1991. Orientasi di Alam Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- West, David, 1996. An Introduction to Continental Philosophy, Cambridge: Blackwell Publishers Inc.
- Wolgast, Elizabeth H., 1987, The Grammar of Justice, New York: Cornell University Press.